

12-1-2009

Banten Pasca Agresi Militer Belanda Kedua

Suharto Suharto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia,
suharto.hum@ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/hubsasia>

Recommended Citation

Suharto, S. (2009). Banten Pasca Agresi Militer Belanda Kedua. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 13(2), 85-90. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i2.231>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Makara Human Behavior Studies in Asia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

BANTEN PASCA AGRESI MILITER BELANDA KEDUA

Suharto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

E-mail: suharto.hum@ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena di Keresidenan Banten setelah daerah itu diduduki oleh Belanda. Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu mencari sumber sejarah (*heuristik*), kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan di kedua pemerintahan sipil yang saling bermusuhan itu berjalan tidak sempurna. Tidak lama setelah Banten diduduki oleh Belanda, beberapa tokoh Banten khususnya yang pro-Belanda membicarakan status daerah itu di masa datang. Dinas Penerangan Keresidenan Banten pro-Belanda menyediakan beberapa alternatif agar dipilih rakyat Banten. Alternatif yang dikemukakan adalah: (1) Banten sebagai Propinsi ke-13 dari Kerajaan Belanda, (2) Banten masuk Negara Indonesia Serikat secara langsung sebagai negara atau daerah istimewa, atau (3) Banten masuk NIS secara tidak langsung dengan terlebih dahulu bergabung dengan negara Pasundan atau Distrik Federal Jakarta. Jika bergabung dengan negara Pasundan, ada dua cara, yaitu daerah itu sebagai keresidenan, atau sebagai negara, atau sebagai daerah istimewa. Beberapa alternatif tersebut disampaikan kepada Badan Perwakilan Rakyat Banten untuk dipilih dan menetapkan suatu delegasi yang tugasnya menyampaikan pilihan mereka ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Ternyata badan tersebut tidak mengikuti keinginan Dinas Penerangan, tetapi menunggu hasil konferensi. Putusannya, Banten tetap masuk wilayah RI sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Banten after the Second Dutch Military Aggression

Abstract

The aim of this research is to expose the phenomenon in Banten Residency after the Dutch occupied the region. There are four steps used in this research, i.e. collecting historical sources (*heuristic*), critique, interpretation and historiography (writing the history). This research result that the two sides of the civil government did not work well. Not long after Banten was occupied by the Dutch, several prominent Bantenese figures, especially those who were pro-Dutch discussed the future status of the region. The Information Department of Banten Residency who was pro-Dutch offered several alternatives for the people of Banten to choose. The alternatives were: (1) Banten became the 13th province of the Dutch Kingdom; (2) Banten joined the United States of Indonesia as a state or got a special status; (3) Banten indirectly joined the United States of Indonesia. First this region joined the state of Pasundan or the Federal District of Jakarta. If Banten joined the state of Pasundan, there are two options, firstly this district as a residency or secondly, as a state or an exclusive territory. Those alternatives were presented to the People Representative Board of Banten for the people to choose and to appoint a delegation who would present their choice to the Round Table Conference in the Hague (Den Haag). But the body did not follow the aspiration of the representative board. This body just had to wait for the conference decision. Based on the conference decision, Banten remained as a part of the Republic of Indonesia which was a state in the United States of Indonesia.

Keywords: Banten, history, revolution

1. Pendahuluan

Ketika Belanda secara serentak melancarkan agresi militernya pertama terhadap wilayah Republik Indonesia tahun 1947, Keresidenan Banten tidak diserang. Pada saat itu, Keresidenan Banten yang terdiri atas Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan

Kabupaten Lebak hanya diblokade secara ketat sehingga menyulitkan hubungan daerah itu dengan pemerintah pusat Republik Indonesia di Yogyakarta dan daerah lain. Wilayah tersebut baru diserang dan diduduki oleh Belanda melalui agresi militernya yang kedua bulan Desember 1948. Di daerah tersebut kemudian dibentuk pemerintahan sipil baru yang diberi nama *Territoriaal*

Bestuurs Adviseur (TBA), berpusat di Serang, mula-mula di bawah pimpinan N. Makkes, kemudian digantikan oleh Mas Asikin Nitiatmaja. Sementara itu, aparat Pemerintah Daerah Banten (republik) di bawah pimpinan Residen Ahmad Khatib menyingkir ke daerah pedalaman di Banten bagian selatan. Dengan demikian, di Banten terdapat dua pemerintahan sipil yang saling bermusuhan.

Pembentukan pemerintahan sipil TBA dilakukan dengan merekrut pegawai pemerintah daerah setempat, menerima para pelamar, dan mendatangkan tenaga dari Jakarta. Tidak lama setelah pemerintahan terbentuk, muncul pemikiran tentang status Banten pada masa datang. Pemikiran itu muncul dari kaum federalis, tokoh masyarakat, dan pemerintah TBA yang pro-Belanda. Pemikiran-pemikiran itu menghendaki agar Banten tidak masuk wilayah RI.

Penelitian tentang Banten telah dilakukan oleh beberapa penulis. Tulisan mereka umumnya merupakan bagian dari karya yang luas dan sebagian besar dilakukan oleh kalangan non sejarawan profesional. Tulisan pertama diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI tahun 1953 berjudul *Republik Indonesia: Propinsi Djawa Barat*, salah satu dari seri penerbitan tentang propinsi-propinsi di Indonesia. Buku tersebut menguraikan daerah Propinsi Jawa Barat, termasuk Banten. Tahun berikutnya, terbit karya Kepala Dokumentasi Jawatan Kebudayaan Jawa Barat Tbg. Rusyan, berjudul *Sedjarah Banten*. Buku tersebut menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Banten sejak abad ke-4 Masehi hingga tahun 1951. Sebuah panitia yang antara lain beranggota Hasan Muarif Ambary menulis laporan hasil penelitian berjudul *Hari Jadi Kabupaten Serang dan Sejarah Banten dari Masa ke Masa*. Laporan hasil penelitian tersebut memberikan sedikit uraian tentang Banten pada awal revolusi.

Karya tentang Banten khusus masa revolusi tidak banyak. Ada dua artikel oleh penulis asing, yaitu oleh Michael C. Williams berjudul "Banten: Utang Padi Dibayar Padi, Utang Darah Dibayar Darah" dimuat dalam Kahin (1990) *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Kedua oleh Ensering berjudul *Banten in Times of Revolution*, dalam *Archipel 50*, Paris, 1995. Kedua artikel tersebut bicara tentang Banten pada awal kemerdekaan khususnya tentang aksi "Dewan Rakyat" pimpinan Ce Mamat.

Berdasarkan uraian tersebut, masalahnya adalah bagaimana keadaan di Keresidenan Banten setelah daerah itu diduduki oleh Belanda? Berdasarkan masalah tersebut pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- (1) Bagaimana pemerintah TBA dibentuk?
- (2) Bagaimana jalannya pemerintahan di kedua pemerintah sipil di Banten?

- (3) Status apa yang dikehendaki oleh rakyat Banten, khususnya mereka yang pro-Belanda terhadap daerah itu?
- (4) Bagaimana status Banten setelah "penyerahan" kedaulatan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana keadaan di Banten ketika di daerah itu terdapat dua pemerintahan yang saling bermusuhan. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang melalui empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada langkah pertama, heuristik, peneliti mencari sumber-sumber sejarahnya berupa sumber tertulis baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa dokumen baik yang dibuat oleh pemerintah daerah Banten (republik) maupun oleh pemerintah daerah Banten buatan Belanda, tulisan-tulisan di surat kabar atau majalah sejawan, dan tulisan pengalaman oleh pelaku sejarah. Dokumen diteliti dari segi fisik apakah dokumen itu asli atau salinan (kritik eksternal) dan dari segi isi (kritik internal) berupa pembacaan sumber secara kritis untuk memperoleh fakta sejarahnya. Untuk melengkapi sumber tersebut digunakan juga sumber sekunder berupa buku atau artikel. Sumber berupa dokumen dicari di Arsip Nasional RI, Pemerintah Daerah Banten, dan Dinas Sejarah Angkatan Darat di Bandung. Sumber berupa surat kabar dan majalah sejawan dicari di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Fakta-fakta yang diperoleh melalui kritik sejarah dikumpulkan, ditafsirkan, disusun secara sistematis, kemudian dibuat narasi (historiografi).

Ruang lingkup penelitian secara spasial adalah daerah Keresidenan Banten dan secara temporal meliputi kurun waktu antara bulan Desember 1948, sejak Banten dikuasai Belanda hingga "penyerahan" kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah RIS bulan Desember 1949.

3. Hasil dan Pembahasan

Setelah Banten diduduki Belanda pada bulan Desember 1948, Belanda membentuk pemerintah sipil yang diberi nama *Territoriaal Bestuurs Adviseur* (TBA). Pemerintah tersebut berpusat di Serang di bawah pimpinan N. Makkes (mulai bulan April 1949 digantikan oleh Mas Asikin Nitiatmaja). Pembentukan pemerintah TBA ini tidak mudah karena beberapa hal. Pertama, sebagian besar pamong praja mulai residen hingga camat dan pegawainya meninggalkan kota menuju daerah pedalaman yang masih aman. Kedua, kaum intelektual Banten lebih suka berada di luar daerah itu dari pada kembali ke daerahnya (Daerah otonom Banten, 1949).

Untuk menyusun aparat pemerintahan daerah, berbagai cara dilakukan. Belanda menghimbau agar kaum intelektual Banten yang ada di Jakarta, Cirebon, dan Lampung segera kembali. Beberapa putra Banten yang tengah menjabat di jajaran pamong praja di daerah lain diharap kembali untuk merintis pemerintah TBA, seperti Mas Asikin Nitiatmaja dan R. Nusrat Jayadiningrat. Untuk mengisi pegawai di luar jajaran pamong praja, Belanda merekrut aparat yang lama. Pegawai pada Jawatan Kesehatan dan Jawatan Sosial disuruh bekerja terus. Belanda juga memaksa pegawai-pegawai yang bekerja pada jawatan-jawatan vital seperti Kantor Pos dan Kantor Tilpon untuk bekerja terus ("Verslag", 1949). Belanda mempekerjakan pegawai sipil yang tertawan dan yang menyerah, menerima pegawai-pegawai republik yang disesuaikan dengan bidang mereka, menerima pelamar-pelamar dari masyarakat, dan mendatangkan tenaga-tenaga dari Jakarta (Pasundan tidak mau, 1949).

Setelah pemerintahan TBA terbentuk, di tiga kabupaten di Banten dibentuk *Lokaal Contact Comite* (LCC) (Panitia Penghubung Setempat). Jawatan Penerangan TBA (bukan LCC) memberi penerangan kepada masyarakat tentang maksud kedatangan Belanda. Jawatan Penerangan di Kabupaten Serang bersama LCC keliling kota-kota kawedanaan di Kabupaten Serang untuk memberikan penerangan kepada masyarakat (Warta-warta, 1949). Penerangan selain diberikan secara lisan, juga lewat poster dan gambar (Rakjat Banten, 1949).

Sementara itu, sebelum ibu kota Banten, Serang, diduduki Belanda, Wakil Gubernur Jawa Barat di Banten Mr. Yusup Adiwinata, Residen Banten Akhmad Khatib bersama sebagian besar aparat pemerintah daerah, dan Kepala Kepolisian Keresidenan Banten Yusup Martadilaga beserta anak buahnya bersama TNI meninggalkan kota hijrah ke daerah pedalaman (Kemerdekaan harus, 1949; Banten bukan, 1949). Hal serupa dilakukan pula oleh aparat pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak menjelang kedatangan tentara Belanda di daerahnya.

Pemerintah Daerah Keresidenan Banten (republik) tidak menyerah kepada Belanda meskipun daerahnya banyak diduduki oleh Belanda. Di pedalaman, pemerintah daerah menjalankan pemerintahan semampunya. Para pemimpin pemerintahan daerah berusaha menyusun kembali pemerintahan daerah untuk mengimbangi pemerintah TBA ("Verslag", 1949). Daerah yang dipilih adalah di Pandeglang Selatan. Pusat pemerintahan daerah berpindah-pindah untuk menyelamatkan diri dari serangan Belanda (N.s., 1955).

Setelah tersusun kembali pemerintah daerah (republik), di Banten ada dua pemerintahan sipil, yaitu pemerintah TBA di kota-kota dan pemerintah daerah (republik) di

Banten selatan. Pemerintah daerah di pedalaman juga mendapat dukungan dari orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda. Mereka memberikan bantuan materi kepada para pejuang di pedalaman. Di kota-kota juga ada orang-orang yang berjuang untuk kepentingan republik. Mereka berusaha untuk memasuki Badan Perwakilan Rakyat (BPR) agar tempat itu tidak dimasuki orang-orang yang berpihak pada Belanda. (N.s., 1955: 16). Pemerintah daerah (republik) berjuang agar seluruh Keresidenan Banten kembali ke pemerintah RI (Dualisme dalam, 1949).

Pemerintah daerah (republik) juga mendapat bantuan dari rakyat. Untuk menjamin kelangsungan perjuangan, pemerintah daerah membuat aturan yang isinya bahwa setiap kepala keluarga setiap bulan menyerahkan tiga liter beras. Waktu panen, setiap kepala keluarga ditetapkan menyerahkan 10% hasil panennya kepada bagian perlengkapan sektor (Soendji, 1983).

Kaum ulama kembali menunjukkan peranannya yang besar. Ketika perang gerilya berlangsung, peran ulama sangat besar. Mereka dipercaya rakyat sebagai pamong praja yang tidak mudah goyang pendiriannya. Mereka memberi contoh ketabahan dalam menghadapi segala macam kesulitan sehingga meneguhkan semangat perlawanan rakyat. Karena peran mereka, TNI walaupun tanpa persiapan pembekalan sama sekali hidupnya terjamin (Nasution, 1979).

Untuk menyampaikan surat-surat, di desa-desa dibentuk penjagaan beserta para perondanya yang meneruskan surat-surat (N.s., 1955). Di pedalaman juga dibuat pasar. Sebagai alat pembayaran digunakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), Uang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara (URIDABS), atau secara barter. Orang tidak berani membawa uang *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) ke desa-desa.

Sementara pembentukan aparat pemerintahan sipil dilakukan, Belanda juga memperbaiki berbagai sarana fisik yang rusak karena politik bumi hangus TNI (Pembangunan kota, 1949; Daerah Republik, 1949). Sampai dengan bulan Februari 1949, perhubungan antar kota di daerah Banten sukar dan tidak aman. Perdagangan antar kota dan desa sejak bulan Februari pulih kembali. Sebagian besar perdagangan dilakukan dengan barter karena sulitnya alat tukar (mata uang). Orang desa hanya mau menerima URIDABS. Di kota-kota besar mulai akhir bulan Januari 1949 beredar mata uang NICA.

Pemerintah TBA hanya berada di kota-kota besar kabupaten. Di kota-kota kecil pamong praja TBA tidak berani keliling di daerahnya, takut untuk berhubungan dengan rakyatnya. Mereka hanya berkantor pada siang hari, malam harinya kembali ke tempat-tempat yang aman, tempat-tempat yang ada tentara Belanda

(Dualisme dalam, 1949). Siang hari tentara Belanda dengan menggunakan kendaraan patroli sampai ke kota-kota kecamatan. Malam harinya mereka kembali ke kota kabupaten (Wawancara dengan Dadang Ismail, 20 November 1997).

Beberapa hari setelah Keresidenan Banten diduduki oleh Belanda, muncul keinginan dari kalangan yang pro-Belanda. Mereka mulai membicarakan status daerah itu di masa datang. Beberapa orang federalis yang duduk dalam Parlemen Negara Pasundan yang dibentuk tanggal 23 Februari 1948 dan diakui oleh Pemerintah Belanda tanggal 24 April 1948 menginginkan agar Keresidenan Banten masuk dalam wilayah Negara Pasundan. Alasan mereka karena Banten pada zaman Hindia Belanda merupakan salah satu keresidenan dari Provinsi Jawa Barat. Atas usul beberapa anggota parlemen, masalah Banten dicantumkan dalam acara sidang Parlemen Pasundan. Bagaimana hasil sidang, tidak diketahui (Banten diminta, 1949).

Sementara itu, beberapa orang terkemuka di Banten menginginkan agar Banten menjadi daerah istimewa yang pemerintahannya otonom (*zelf bestuur*) dalam lingkungan pemerintah federal Indonesia (Banten diminta, 1949). Menurut mereka, melalui pemerintahan otonom, Banten dapat dibawa ke arah kemajuan yang pesat. Mereka lebih percaya pada orang-orang Banten, dan tidak menyerahkan kebijakan politik pemerintahan kepada orang dari luar Banten. Pikiran semacam itu telah lama ada di hati mereka. Sesungguhnya, usaha ke arah terbentuknya pemerintahan otonom telah dilakukan, namun mengalami beberapa kesulitan, antara lain karena para pemimpin yang berpengaruh terhadap rakyat berada di daerah pedalaman; tidak adanya tenaga intelektual yang akan memegang pemerintahan itu; dan kaum terpelajar putra Banten yang berada di luar daerah tidak mau kembali ke daerah asal mereka (Daerah otonom, 1949).

Berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan Banten sebagai daerah istimewa, Residen Banten TBA Mas Asikin Nitiatmaja yang menggantikan N. Makkes sejak April 1949, mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Negara Pasundan. Kalangan pemuka Banten (pro-Belanda) mengharapkan agar R.A.A. Hilman Jayadiningrat, mantan Bupati Serang yang menjadi Kepala Distrik Federal Jakarta, bersedia menjadi wali negara, mengingat namanya dikenal oleh masyarakat. Jika daerah istimewa terbentuk yang akan mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya dibicarakannya penggabungan dengan Negara Pasundan (Banten digabungkan, 1949).

Setelah keluar Roem Royen *Statements* tanggal 7 Mei 1949, di Banten timbul berbagai tafsiran terhadap isi persetujuan itu, khususnya Pasal 4 dari pernyataan van Royen. Dinas Penerangan Keresidenan Banten TBA

menyajikan beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh rakyat Banten mengenai status daerahnya. Pasal tersebut ditafsirkan bahwa suku-suku bangsa di Indonesia masih diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Orang Banten yang menurut mereka merupakan suku bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya. Mereka merasa perlu untuk mengirim delegasi ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang dimulai bulan Agustus 1949.

Dinas Penerangan Keresidenan Banten TBA pada tanggal 10 Juni 1949 mengeluarkan siaran kilat berjudul "Status Banten". Dinas Penerangan mengharapkan agar rakyat Banten memilih salah satu alternatif, kemudian mengirim suatu delegasi untuk menyampaikan aspirasi mereka ke KMB. Adapun alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, Banten dapat memilih kedudukan istimewa, baik terhadap Negara Indonesia Serikat (NIS) maupun terhadap Kerajaan Belanda. Alternatif tersebut meniru gerakan di Minahasa waktu itu yang berusaha untuk keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT). Gerakan tersebut menghendaki kedudukan istimewa dalam uni antara NIS dan Kerajaan Belanda, yaitu sebagai Propinsi ke-12 (*Twaalfde Provincie*) dari Negeri Belanda. Melihat contoh itu, siaran kilat itu memberikan alternatif bahwa Banten dapat keluar dari NIS dan menjadikan daerah itu sebagai Propinsi ke-13 (*Dertiende Provincie*) dari Negeri Belanda (Dinas Penerangan Keresidenan Banten, 1949). Kedua, Banten masuk NIS secara langsung. Dalam alternatif kedua ada beberapa pilihan: (a) Banten dapat berdiri sendiri sebagai negara atau sebagai daerah istimewa yang langsung di bawah Pemerintah NIS. Jika Banten mau berdiri sendiri sebagai negara, susunan pemerintahannya dapat mencontoh susunan negara yang sudah ada dengan memperhatikan perbedaannya. Jika mau berdiri sendiri sebagai daerah istimewa, susunan pemerintahannya dapat mencontoh Daerah Istimewa Kalimantan Barat. (b) Banten masuk lingkungan NIS secara tidak langsung dengan terlebih dahulu Banten menggabungkan diri dengan salah satu negara atau "daerah" tetangga yang telah terbentuk. Ada tiga pilihan kepada negara atau "daerah" mana Banten mau bergabung, yaitu dengan Distrik Federal Jakarta, Republik Indonesia, atau Negara Pasundan. Jika Banten mau bergabung dengan Negara Pasundan, ada dua cara, yaitu menggabungkan diri dengan status sebagai keresidenan, dan menggabungkan diri secara perserikatan atau federatif. Dalam hal ini Banten bisa menjadi negara atau sebagai daerah Istimewa (Dinas Penerangan Keresidenan Banten, 1949). Pilihan lainnya, jika dipenuhi syarat-syaratnya, Banten dapat sebagai daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri (*zelf bestuur*), yaitu daerah yang mempunyai sultan atau raja yang turun-temurun. Dikemukakan bahwa pilihan tersebut adalah mungkin mengingat Banten di masa lalu merupakan kesultanan.

Pada bagian akhir "Siaran Kilat" yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penerangan Keresidenan Banten (TBA), terdapat ajakan terhadap rakyat Banten untuk menentukan pilihan mereka. Untuk itu, Pemerintah Banten (TBA) membentuk Badan Perwakilan Rakyat (BPR). Sejak awal bulan Juni diselenggarakan rapat-rapat pemilihan anggota BPR yang jumlahnya untuk seluruh Keresidenan Banten sebanyak 62 orang. Anggota BPR Kabupaten Pandeglang banyak dimasuki oleh bekas anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan beberapa bekas anggota Bambu Runcing. Dari BPR Kabupaten Serang banyak dimasuki oleh kalangan pamong praja (Perundingan bersama, 1949).

Pada pertengahan bulan Juli 1949 BPR Keresidenan Banten menyelenggarakan rapat untuk menentukan statusnya dan memilih suatu delegasi rakyat Banten untuk menghadiri KMB. Namun usaha itu gagal, BPR memandang tidak perlu membicarakan status Banten dan menyerahkan soal tersebut kepada pemerintah RI dan Belanda (N.s., 1955).

Sementara itu Negara Pasundan berusaha agar Banten masuk wilayahnya. Bulan Agustus 1949 Wali Negara Pasundan pergi ke Banten minta kepada pimpinan Banten TBA agar Banten dititipkan kepada Negara Pasundan sebelum dilaksanakan plebisit (Pasundan, 1949).

Di tingkat nasional, usaha untuk menyelesaikan permusuhan antara Indonesia dan Belanda terus dilakukan melalui diplomasi. Usaha diplomasi itu akhirnya berhasil dengan terselenggaranya KMB di Den Haag sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasilnya adalah bahwa pemerintah Belanda "menyerahkan" kedaulatan Indonesia kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Apa yang terjadi di tingkat nasional dilaksanakan di tingkat daerah. Daerah-daerah RI menurut batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan Renville secara berangsur-angsur dikembalikan. Daerah-daerah yang tidak termasuk dalam satu negara bagian, seperti Banten, diserahkan kepada RI.

Sebelum "penyerahan" kedaulatan di tingkat nasional dilaksanakan, pada tanggal 17 Desember 1949 Keresidenan Banten diserahkan kembali oleh Pemerintah TBA kepada Residen Banten di bawah pimpinan *United Nation Commission for Indonesia* (UNCI). Banten akhirnya secara resmi kembali menjadi bagian dari wilayah RI.

4. Simpulan

Pemerintahan daerah TBA dibentuk dengan merekrut pegawai-pegawai pemerintah sebelumnya, menerima lamaran rakyat, dan mendatangkan pegawai dari Jakarta. Pemerintah daerah (republik) yang hijrah ke daerah pedalaman membentuk pemerintahan di daerah

yang aman dari tentara Belanda. Kedua pemerintah tersebut berjalan dengan tidak sempurna karena adanya keterbatasan-keterbatasan.

Pemerintah TBA hanya berada di kota-kota besar kabupaten. Di kota-kota kecil mereka hanya berkantor pada siang hari, malam hari mereka kembali ke tempat-tempat yang ada tentara Belanda. Pemerintah daerah (republik) berada di daerah pedalaman mendapat bantuan dari rakyat.

Pemerintah daerah (republik) tetap memiliki pemikiran tentang status Banten pada masa datang. Mereka berjuang agar daerah itu kembali sebagai wilayah RI. Sebaliknya, orang-orang yang pro-Belanda tidak suka daerah itu masuk wilayah RI. Oleh karena itu, tidak lama setelah daerah itu dikuasai oleh Belanda, muncul pemikiran tentang status Banten pada masa datang. Pemikiran tersebut muncul dari mereka yang pro Belanda, mereka tidak suka daerah itu masuk wilayah RI. Sebaliknya, mereka menghendaki agar Banten berada di luar RI. Pemerintah daerah Banten TBA menyuguhkan beberapa alternatif tentang status Banten pada masa datang. Alternatif yang disuguhkan diminta agar dipilih oleh Badan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, Badan tersebut yang masih dikuasai oleh orang-orang pro republik menyerahkan putusan tentang status Banten pada hasil KMB. Setelah "penyerahan" kedaulatan, Banten tetap menjadi bagian dari RI sebagai salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Daftar Acuan

Ambary, H.M., Michrob, H., Darussalam, Sasmita, U. T. (1985). Hari jadi kabupaten Serang dan sejarah Banten dari masa ke masa. Serang. Naskah tidak diterbitkan.

Banten bukan keketjualian. (1949, Th. II, Januari 22). *Merdeka*, hlm. 7.

Banten diantara daerah istimewa dengan negara Pasundan. (1949, Februari 24). *Warta Indonesia*.

Banten digabungkan dengan Pasundan. (1949, Mei 3). *Sin Po*.

Banten diminta masuk Pasundan. (1949, Januari 4). *Sin Po*.

Daerah otonom Banten. (1949, Januari 19). *Merdeka*.

Dinas Penerangan Keresidenan Banten (TBA). (1949). "Status Banten: kemungkinan-kemungkinan apa jang akan dapat kita ambil?", Siaran kilat tanggal 10 Juni 1949.

Djohani, M. (1992). Riwayat hidup dan perjuangan. Mandalawangi. Naskah tidak diterbitkan.

- Dualisme dalam pemerintahan sipil di Banten. De facto ada di tangan republik. (1949, Oktober 11). *Merdeka*.
- Ensering, E. (1995). Banten in times of revolution, *Archipel* 50. Paris, 131-163.
- "Intel Priangan, Djawa Barat, Tahun 1946-1949", Koleksi Subdisjarah Disbintal AD, Bandung.
- Keadaan pemerintahan di Banten. (1949, Januari 20). *Merdeka*.
- Kementerian Pererangan RI. (1953). *Republik Indonesia: propinsi Djawa Barat*. Djakarta.
- Kemerdekaan harus berisi kemakmuran. Kiai Achmad Chatib dan stafnja melarikan diri. (1949, Januari 6). *Sin Po*.
- Madjiah, M. (tanpa angka tahun). Konsekuen hingga akhir: kisah seorang prajurit TNI. Jakarta. Naskah tidak diterbitkan.
- Menindjau Banten Selatan. keamanan dan ketenteraman mulai kembali lagi. (1949, Maret 21), *Warta Indonesia*.
- Nasution, A.H. (1979). *Sekitar perang kemerdekaan Indonesia: agresi militer Belanda II*. Jilid X, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Notosoetardjo. (1956). *Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar*. Djakarta: Endang.
- N.s. (1955). Perkembangan di daerah Pandeglang sedjak proklamasi hingga sekarang. Naskah tidak diterbitkan.
- Pasundan. (1949, Agustus 10). *Sin Po*.
- Pasundan tidak mau kuasai Banten. (1949, Maret 3). *Sin Po*.
- Pembangunan kota Rangkasbitung pesat. (1949, Mei 4). *Warta Indonesia*.
- Pembangunan setjara gugur gunung. (1949, Oktober 4). *Antara*.
- Pembersihan terhadap Banten kemarin dimulai. (1948, Desember 24). *Warta Indonesia*.
- Perundingan bersama untuk menentukan ketatanegaraan Banten. (1949, Juli 4), *Warta Indonesia*.
- Rakjat Banten bekerdja suka rela. (1949, April 6). *Warta Indonesia*.
- Roesjan, Tbg. (1954). *Sedjarah Banten*. Djakarta: Arief.
- Sjam'un, K.H.R. (1976). Sejarah Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) daerah Banten. Serang. Naskah tidak diterbitkan.
- Soendji, T. (1983). Mengenang perdjuaan rakjat Pandeglang, 1945-1950. Bandung. Naskah tidak diterbitkan.
- Supangkat, T. (1997). Riwayat hidup singkat dan pengalaman pelaku sejarah pada masa perang kemerdekaan, 1945-1949. Jakarta. Naskah tidak diterbitkan.
- Umar, A. (1976). Perjuangan rakyat Banten pada jaman Jepang dan Belanda. Serang. Naskah tidak diterbitkan.
- Verslag tentang djalannja politiek sedjak 19 Desember 1948 hingga kini. Serang 1 Desember 1949. Naskah tidak diterbitkan.
- Wal, S.L., diteruskan P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten (ed.). (1991). *Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen, 1945-1949*. Jilid XVI. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Warta-warta dari Banten. (1949, Maret 9). *Warta Indonesia*.
- Wawancara dengan Drs. H. Eddy Suwarna Mayor (Purn., 68 tahun) di Warunggunung, Lebak, 5 Oktober 1997 dan di Depok, 12 Agustus 2000.
- Wawancara dengan Mirsad, Kapten (Purn. 70 tahun), di Rangkasbitung, 20 November 1997.
- Wawancara dengan H. Muhammad Dadang Ismail (Purn, 78 tahun), di Rangkasbitung, 20 November 1997.
- Williams, M.C. Banten: utang padi dibayar padi, utang darah dibayar darah, dalam Audrey Kahin (ed). (tej.). (1990). *Pergolakan daerah pada awal kemerdekaan*. (hlm. 60-87). Jakarta: Grafiti.